

BAB II

SEJARAH ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

A. Sejarah Awal Masuknya Etnis Tionghoa Di Tanah Jawa

Sebelum berdirinya Negara yang diberi nama Indonesia di tanah jawa ini etnis Tionghoa sudah menginjakkan kaki di tanah jawa ini. Dari berbagai catatan sejarah para pedagang Tionghoa telah datang ke daerah pesisir laut cina selatan sejak 300 tahun sebelum masehi, namun catatan sejarah tertulis menunjukkan mereka datang ke Asia tenggara lama setelah itu.²³ Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa ("*To lo mo*") dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah di Jawa untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Di Jawa, ia berguru pada seseorang yang bernama Janabhadra.²⁴ Dalam catatan kuno Cina menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan kuno Jawa sudah menjalin hubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina.

Pada awalnya mereka hanya tinggal beberapa waktu yang pendek selama masa kunjungan perdagangan yang dilakukan di beberapa kota pesisir. Namun melihat kekayaan dan potensi tanah jawa pada tahun-tahun berikutnya banyak etnis Tionghoa berdatangan dan menetap di jawa untuk memperoleh

²³Abdullah Dahana, Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia, Jurnal Wacana, Vol 2 No 1, Jakarta : 2001 hlm, 54.

²⁴FX. Lilik Dwi M. Imlek, *Tradisi Yang Tak Lagi Sendiri Jakarta* (ANTARA News). Dalam <http://www.antaraneews.com/berita/53516/imlek-tradisi-yang-tak-lagi-sendiri> diakses 29-03-2015

penghidupan yang lebih baik dengan tujuan utamanya adalah berdagang. Kedatangan mereka (etnis Tionghoa) diterima dengan baik oleh warga pribumi, akulturasi yang berjalan antara dua kebudayaan tersebut berjalan dengan baik.

Bahkan karena para perantau Tionghoa yang datang ke Jawa di dominasi oleh kaum laki-laki orang-orang Tionghoa ini kemudian menikah dengan wanita-wanita pribumi. Banyak diantara anak-anak mereka ini memeluk agama Islam dan banyak diantara mereka ini yang menikah dengan anak-anak wanita dari keluarga kerajaan. Hal inilah yang menjadi salah satu jalan penyebaran agama Islam di Nusantara oleh orang-orang Tionghoa. Kedekatan orang-orang Tionghoa dengan kerajaan yang berkuasa pada saat itu diantaranya Majapahit abad pada masa kekuasaan Hayam Wuruk memberi banyak keuntungan, diantaranya muncul berbagai perlakuan istimewa terhadap orang asing dengan memberikan kedudukan setara dengan pejabat dan memberikan wewenang kepada orang-orang asing diantaranya orang-orang Tionghoa.²⁵

Tak heran jika berbagai perlakuan istimewa didapatkan oleh orang-orang Tionghoa karena keberadaan mereka bisa dikatakan sangat berperan besar dalam perkembangan perekonomian di tanah Jawa, khususnya kemakmuran Majapahit. Orang-orang Tionghoa yang menetap di Jawa mengembangkan kota-kota pelabuhan penting di pantai utara seperti Gresik, Tuban dan

²⁵ Adrian Perkasa, *Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012. hlm. 47.

Surabaya. Mereka adalah pioneers pertama dari imigran-imigran Tionghoa ke *Nan-Yang* (Lautan Selatan). Hal ini tentunya mengantarkan kerajaan Majapahit pada perdagangan internasional, dan menjadikannya sebagai pasar komoditif berkualitas dari India dan Cina.

Namun dibalik keadaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada saat itu terdapat sebuah kondisi stratifikasi sosial dalam catatan Ma Huan ketika ia mengunjungi Ibu kota kerajaan Majapahit, Trowulan dalam armada pelayaran Cheng Ho. Dalam catatannya terdapat tiga kelompok sosial disana yaitu.²⁶

1. Masyarakat Muslim *Huihui* atau *Huihui ren* yang berasal dari barat dan menetap disana. Disebutkan bahwa pakaian dan makanan mereka bersih dan layak (dalam manuskrip asli Ma Huan yang memakai aksara Cina jelas disebutkan *Huihui*, sedangkan dalam terjemahan Indonesia kata ini dirubah maknanya yaitu kelompok arab. Padahal aksara itu dikalangan arab adalah *Ta Shih*).
2. Masyarakat Tionghoa atau *Tang ren* yang berasal dari *Guangdong*, *zhangzou*, dan *Quazhou*. Mereka adalah pelarian dari daerah asalnya dan menetap di Ibu kota kerajaan Majapahit. Pakaian dan makanan mereka sangat layak dan bagus. Mayoritas dari kelompok ini adalah beragama islam dan mengajarkan ajarannya.

²⁶ W.P.Groeneveldt, Nusantara dalam catatan Tionghoa. Jakarta: komunitas Bambu, 2009.hlm 63-69.

3. Penduduk pribumi. Menurut Ma Huan, kelompok ini sangat kotor dan jelek. Tidak memakai alas kaki dan makanan mereka tidak layak namun banyak dari mereka yang kaya dan menyukai barang mewah seperti porselen dari Cina. Perbedaan antara raja dan rakyat sangat kentara, seperti keraton raja yang megah sedangkan rumah tinggal penduduk hanya beralaskan jerami.

Dalam catatan tersebut menunjukkan bahwa kejayaan yang diperoleh oleh kerajaan Majapahit tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat Majapahit yang masih hidup pada tingkatan sosial paling bawah dibawah bangsa asing yang mendiami tanah jawa ini. Kedudukan orang Tionghoa yang beragama islam dengan kemapanannya juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan ajaran islam di Majapahit. Karena dengan kedudukan tersebut akan dengan mudah bagi orang Tionghoa yang beragama islam untuk memberikan pengaruhnya terhadap orang pribumi keluarga kerajaan untuk mempelajari ajaran islam. Bahkan banyak diantara anggota keluarga kerajaan yang menikah dengan orang-orang Tionghoa yang beragama islam yang pada akhirnya memeluk islam dan hal ini sangat berpengaruh kepada rakyat majapahit untuk memeluk agama islam.

Setelah ratusan tahun berlalu, kebudayaan Tionghoa semakin berbaur dengan tatacara kehidupan komunitas yang lebih dulu menapakkan kaki di Nusantara Bahkan dalam hal tertentu, kebiasaan atau istilah tertentu yang sepertinya khas Tionghoa, ternyata hanya ditemukan di Nusantara, tidak di daerah lain. Hal itu dikarenakan pertalian antar budaya etnis yang kuat

sehingga menimbulkan ciri khas tersendiri. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti sejarah, diantaranya beberapa motif relief di Candi Sewu yang berada di wilayah Yogyakarta diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok.²⁷ Perpaduan budaya Tionghoa dengan Jawa telah menghasilkan berbagai barang seni kerajinan yang bermutu tinggi. Hal ini nampak jelas pada corak batik pesisir. Motif tradisional Jawa berbaur dengan corak Tionghoa. Gambar lilin, yaitu hewan kahyangan dalam mitologi Tionghoa sering terlihat dalam batik Cirebonan.²⁸

B. Etnis Tionghoa Pada Masa VOC

Pada masa VOC²⁹ menguasai Nusantara antara tahun 1606-1799. Dunia perdagangan Nusantara di monopoli oleh VOC. Hanya VOC yang boleh berhubungan dagang dengan penguasa setempat. VOC menjual barang yang berasal dari Eropa dan Jepang kepada penduduk setempat melalui kaum bangsawan, dan sebaliknya mereka membeli bahan mentah produk pertanian, perkebunan, dan hutan dari penduduk setempat. Pedagang Tionghoa masih diberi kesempatan untuk menjual barang-barang produk Cina yang mereka bawa dari daratan Cina. Sementara itu berbagai penduduk Tionghoa yang bukan pedagang mulai makin banyak pergi merantau keluar dan masuk Nusantara. Di Nusantara, mereka khususnya masuk ke Batavia, mereka

²⁷ Rustopo, Jawa Sejati, (*Otobiografi Go Tik Swan*). Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.

²⁸ Daradjadi, Geger Pecinan 1740-1743, (*Persekutuan Tionghoa-Jawa melawan VOC*). Yogyakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013. hlm, 68.

²⁹ VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) atau sering disebut kompeni oleh orang Jawa, merupakan sebuah maskapai dagang Hindia Belanda yang mempunyai hak-hak istimewa sebagai layaknya suatu pemerintahan di sebuah wilayah.

bekerja sebagai kuli dan tukang. Mereka adalah orang-orang miskin, atau musuh negara yang dikejar-kejar pemerintah Tionghoa.

Begitu besarnya jumlah perantau Tionghoa di Batavia pada masa itu, menimbulkan kekhawatiran kompeni hingga dibuat suatu ketentuan migrasi baru. Salah satunya berbunyi bahwa orang Tionghoa yang sudah tinggal di batavia antara 10-12 tahun, tetapi belum mendapatkan izin tetap akan dideportasi ke Tiongkok. Namun pada tahun 1729 VOC mengeluarkan amnesti imigrasi yang menyatakan bahwa orang Tionghoa yang belum mempunyai izin diperkenankan untuk mengajukannya dengan membayar dua ringgit.³⁰ Akibat diberlakukannya peraturan ini orang-orang Tionghoa menjadi bulan-bulanan oleh para pejabat VOC dan menjadi ajang pemerasan, karena orang-orang ditangkap dan akan dilepas setelah memberikan uang.

Dalam fase ini kita mencatat peristiwa penting, bagaimana posisi pedagang Tionghoa yang mendominasi dunia perdagangan Nusantara diambil alih oleh VOC. VOC memberikan sedikit ruang dan kesempatan bagi orang Tionghoa sebagai pedagang kecil keliling. Sementara itu, populasi perantau Tionghoa terus meningkat naik di Batavia khususnya dan di Nusantara umumnya. Berbagai tekanan dan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh VOC terhadap orang-orang Tionghoa dan pribumi tersebut menyulut kebencian orang-orang Tionghoa dan pribumi terhadap VOC. Hingga mencapai puncaknya pada pada tahun 1740, sehingga mereka berani

³⁰ Daradjadi, *Geger Pecinan 1740-1743*, hlm,29.

membentuk sebuah koalisi dan mengorganisir satu pemberontakan melawan pemerintah VOC di Batavia.³¹

Namun pemberontakan ini dapat dipadamkan seketika oleh VOC dengan memprakarsai pembantaian terhadap orang Tionghoa oleh orang-orang pribumi dengan iming-iming hadiah untuk per kepala orang Tionghoa yang di dapatkan, kejadian menimbulkan korban yang begitu banyak di kalangan perantau Tionghoa. Sehingga peristiwa ini juga terkenal dengan nama *The Chinese Massacre* (Pembunuhan terhadap orang Tionghoa). Dalam fase ini kita mencatat peristiwa penting, bagaimana posisi pedagang Tionghoa yang mendominasi dunia perdagangan Nusantara diambil alih oleh VOC. VOC memberikan sedikit ruang dan kesempatan bagi orang Tionghoa sebagai pedagang kecil keliling. Sementara itu, populasi perantau Tionghoa terus meningkat di Batavia khususnya dan di Nusantara umumnya.

C. Etnis Tionghoa Pada Masa Kolonial Belanda

Jatuhnya VOC pada tahun 1799, membuat kekuasaan politik Nusantara diserahkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa ini, kegiatan ekonomi dalam skala besar, khususnya dalam bidang perdagangan, berada di tangan orang Eropa. Orang-orang Tionghoa dan orang Non-Nasrani lain tidak diperbolehkan memperdagangkan barang produk Eropa, Amerika, dan Afrika secara langsung. Orang Tionghoa hanya boleh menjadi pedagang perantara antara pedagang besar orang Eropa dan penduduk Pribumi.

³¹ Daradjadi, *Geger Pecinan 1740-1743*. hlm, 32.

Situasi seperti ini secara umum terlihat sampai tahun 1870, ketika sistem tanam paksa dihapus, dan liberalisasi ekonomi Hindia Belanda dimulai. Dari sini seterusnya kegiatan ekonomi pengusaha Tionghoa kembali marak dan maju, khususnya dalam bidang industri dan perdagangan menengah. Kegiatan ekonomi Tionghoa di Nusantara juga dapat dilihat dari segi regional. Secara umum, di pulau Jawa perantau Cina bergerak dalam bidang perdagangan. Sebagian kecil bergiat dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hanya sedikit yang masuk ke dalam kegiatan pertambangan. Sementara itu di luar Jawa justru pertambangan dan perkebunan yang menarik banyak pengusaha Cina ini.

Posisi yang kuat dari pengusaha Eropa dalam kegiatan perekonomian di Indonesia pada zaman penjajahan dapat di maklumi dan dianggap wajar oleh banyak orang, mengingat kekuasaan politik yang berada di tangan penjajah Belanda. Tapi kuatnya posisi pengusaha Tionghoa pada masa itu, sering menjadi kekaguman banyak pengamat, dan keadaan ini biasanya dianggap berkaitan secara kuat dengan jiwa kewira-usahaan mereka. Karena superioritas Tionghoa di bidang perdagangan tersebut menurut beberapa ilmuwan seperti *Victor Purcell* dan *Lea Williams*, justru penguasa kolonial Belanda memiliki sentimen anti Cina yang sangat besar.

Sentimen anti Cina ini memuncak pada zaman Politik Etis, ketika Belanda merasa perlu melindungi penduduk pribumi terhadap "kelicinan" Tionghoa. Sebab sepanjang sejarah, orang Tionghoa menempati kedudukan sebagai pedagang perantara Eropa dengan pribumi dan mendominasi perdagangan di

jalan-jalan utama tiap kota di Jawa. Kedudukan ekonomi ini hingga saat itu tetap bertahan atau dipertahankan. Sebagai kelompok yang berkuasa dan berpengaruh besar di bidang ekonomi tentunya etnis Tionghoa membuat pemerintah kolonial hindia belanda merasa terancam dengan keberadaannya. Sehingga untuk memperlancar monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia pemerintah kolonial mulai membuat berbagai propaganda dengan kekuasaannya dan memecah belah kerukunan antara etnis di Indonesia.

Dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, pemerintah Hindia Belanda membuat berbagai peraturan, salah satunya dengan membagi masyarakat ke dalam tiga golongan rasial yang terdiri dari Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, dan lain-lain) dan pribumi. Sampai kira-kira tahun 1910, setiap golongan ras ditetapkan tinggal di masing-masing kampung sehingga ada kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Bugis, Kampung Melayu dan lain-lain.³² Pembatasan terhadap mobilitas badniah itu, bagi golongan Timur Asing seperti Tionghoa dipertegas dengan keharusan memiliki pas jalan bagi perjalanan dari satu kampung Cina ke yang lain. Sistem pembatas bergerak itu dikenal sebagai *Passenstelse* dan *Wijkenstelsel* (sistem pas jalan dan perkampungan) terlihat seperti sistem *Apartheid* yang kemudian dikenal di Afrika Selatan yang pada akhirnya runtuh juga.

Dengan demikian banyak prasangka yang dilontarkan oleh warga pribumi mengatakan bahwa golongan penduduk Tionghoa selalu diprioritaskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hingga timbul rasa cemburu pada golongan

³² Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*. hlm, 73.

yang menduduki kelas sosial paling bawah di bawah etnis Tionghoa yang notabeneanya adalah pendatang. Politik kolonial anti Cina ini menyebabkan timbulnya gerakan emansipasi atau gerakan Cina-Jawa. Mereka menuntut persamaan hak dengan orang Eropa. Gerakan ini adalah yang pertama dari segolongan penduduk di masyarakat Hindia Belanda yang bergerak menghadapinya. Gerakan ini berhasil menghapus semua pembatas terhadap mobilitas fisik orang Tionghoa (*keharusan tinggal di kampung Cina dan pas jalan bagi orang Cina*).

Pada awal abad 20 berbagai gerakan nasional Indonesia mulai bermunculan guna mengakhiri pemerintahan kolonial dan mendirikan suatu negara yang berkebangsaan Indonesia. Dari gerakan ini muncullah berbagai partai Nasionalis yang melatarbelakangi terciptanya lambang-lambang kebangsaan seperti bahasa nasional, bendera kebangsaan dan lagu kebangsaan.

Namun pada masa-masa itu orang-orang Tionghoa mulai tersingkir dari berbagai pergerakan nasional. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi sosial-politik yang berdiri atas kelompok-kelompok etnis atau rasial. Berbagai gerakan nasionalis yang ada pada saat itu seperti Partai Nasionalin Indonesia (PNI), Partindo, PNI Baru dan Parindra juga menutup diri dari keanggotaan penduduk non-pribumi. Bahkan salah satu gerakan paling berpengaruh saat itu misalnya Sarekat Islam juga bernadkan anti Tionghoa.³³ Berbagai partai politik yang berjuang memperjuangkan

³³ Sarekat Islam merupakan sebuah gerakan yang terbentuk dari para pedagang dan pemilik tanah yang beragama Islam, organisasi ini bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi

kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1920-1030 menolak untuk memberi kesempatan kepada para aktifis politik Tionghoa yang berorientasi ke nasionalisme Indonesia untuk menjadi bagian dari partai mereka.³⁴

Pada tahun-tahun itu, konsepsi Indonesia sebagai konsep politik lahir, dan puncaknya terjadi pada tahun 1928: Lahirnya Sumpah Pemuda yang dianggap sebagai tanda pengesahan kebangsaan Indonesia. Namun dalam acara tersebut berbagai organisasi kesukuan di wilayah Indonesia (kecuali pemuda Irian Jaya) menghadirkan perwakilannya, namun organisasi-organisasi Tionghoa tidak ikut serta.³⁵ Pengecualian dari kecenderungan ini adalah konsep "Indisch" atau "Hindia" dari *Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)* pada tahun 1909.

Gerakan Cina-Jawa pada dasarnya bergerak demi golongan Tionghoa itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan adanya gerakan Nasionalisme Cina di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 yang menyebabkan kaum Tionghoa mulai berorientasi ke China seperti Tionghoa Hwee Koan dan Siang Hwee. Ini dapat di mengerti mengingat politik apartheid pemerintah kolonial sehingga setiap golongan rasial penduduk hanya bergerak demi golongannya sendiri. Ini menjadi khas zaman pergerakan pada masa Hindia Belanda. Ketika pergerakan "nasional" timbul, gerakan-gerakan itu tetap saja bergerak hanya demi tiap-tiap golongan penduduk. Misalnya, Jawa demi Jawa (Boedi

penduduk asli yang beragama islam. Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Press, 1984. hlm, 7.

³⁴ Choirul Mahfud. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm, xii.

³⁵ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Press, 1984. hlm, 5.

Oetomo/Jong Java), Sumatra demi Sumatra (Jong Sumatra), Ambon demi Ambon (Jong Ambon).

Menjelang kemerdekaan Indonesia, yakni pada masa pendudukan Jepang kesadaran atas etnisitas semakin diperkuat. Golongan Tionghoa diurus secara terpisah dari penduduk pribumi serta didorong agar mempertahankan identitas etnisnya. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau dalam UUD 1945 yang diterima oleh para nasionalis menetapkan bahwa “Presiden Republik Indonesia haruslah seorang asli Indonesia”.³⁶ Hal ini tentunya secara tidak langsung menolak dan menganggap bahwa warga keturunan Tionghoa lokal dan peranakan lain yang ada di Indonesia bukan bagian dari negara Indonesia dan menolak keberadaan warga keturunan Tionghoa dan peranakan lain.

Keadaan semacam ini membuat kurangnya interaksi antara orang Tionghoa dengan Pribumi hingga muncul berbagai stereotip antara kedua golongan tersebut. Orang-orang pribumi memandang orang Tionghoa sebagai kelompok yang eksklusif yang hanya mementingkan keuntungan dalam bisnis. Sementara orang Tionghoa memandang orang Pribumi sebagai kelompok masyarakat yang pemalas dan pemeras karena Orang-orang Pribumi yang mendapat kedudukan tinggi dalam pemerintahan sering memeras para pengusaha Tionghoa. Berbagai faktor diatas sering menyebabkan berbagai kerusuhan anti Tionghoa.

D. Etnis Tionghoa Pada Masa Pemerintahan Orde lama

³⁶Muh. Yamin, penyunting *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1*. Jakarta: Prapanca 1959, hlm. 28.

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Setelah lepas dari pendudukan Jepang yang melarang semua partai politik, baik partai Pribumi, Belanda, maupun Tionghoa, bermunculan kembali berbagai golongan Tionghoa dengan berbagai orientasi, baik berorientasi ke China maupun ke Hindia Belanda. Dengan adanya konflik Indonesia-belanda, berbagai partai politik mulai terbuka bagi keanggotaan terhadap etnis Tionghoa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dukungan dari etnis Tionghoa demi tercapainya tujuan para nasionalis.

Golongan Tionghoa yang berorientasi ke Indonesia mulai menunjukkan taringnya, diantaranya Persatuan Tionghoa pada tahun 1948 yang kemudian menjadi Partai Demokrat Tionghoa (PDTI, 1950-1954) dan juga organisasi-organisasi lainnya yang berorientasi ke Indonesia lainnya seperti Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKRI).³⁷ Namun pada umumnya para kaum Tionghoa totok tetap berorientasi pada negara China. Hal ini tentunya terjadi karena berbagai sebab, diantaranya terbentuknya RRC pada tahun 1949. Yang pada dasarnya meneruskan nasionalisme China. RRC mengeluarkan kebijakan terhadap orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di berbagai tempat sebagai warga negara China yang menyebabkan ketegangan antara pemerintah Indonesia dan China.

Setelah tahun 1950an, pemerintah Republik Indonesia berusaha membangun kehidupan ekonomi Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan pengusaha Pribumi. Dengan demikian, secara tidak

³⁷ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, "Kasus di Indonesia". hlm, 26

langsung di khawatirkan akan membawa efek kepada kelangsungan dominasi pengusaha Tionghoa. Untuk memperkuat pengusaha pribumi dalam persaingan dagang pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna melindungi kekuatannya. Kebijakan ini salah satunya dituangkan dalam “Program Benteng” yang pemikiran dasarnya bersumber dari prasaran Mr. Assaat, “Perlindungan Khusus” dalam Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya 19-23 Maret 1956. Isi dari proposal ini antara lain:

1. Pembinaan perusahaan milik pengusaha Pribumi dengan cara memberikan fasilitas kredit bank dan lisensi import-eksport secara khusus.
2. Menutup komoditi-komoditi dan pasar-pasar domestik tertentu dari penetrasi pengusaha asing dan keturunan asing, dan sebaliknya menyediakan pasar tersebut bagi pengusaha Pribumi.

Ternyata kebijakan ini tidak menggoyahkan peranan dan kekuatan dari pengusaha Tionghoa. Hanya beberapa pengusaha Pribumi yang berhasil maju melalui program ini. Sebagian besar yang lain, karena kekurangan modal, telah menjual “lisensi” khusus yang mereka peroleh dari pemerintah kepada pengusaha tionghoa, sehingga munculah perusahaan-perusahaan Ali-Baba. Perusahaan itu secara resmi adalah atas nama pengusaha Pribumi, tetapi modal dan pengusaannya adalah pengusaha Cina. Setelah itu menyusul berbagai kebijakan lain, antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 yang melarang semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa mulai dari 31 Desember 1959.

Pada zaman “Demokrasi Terpimpin” Presiden Soekarno (1959-1965), banyak perusahaan besar Belanda yang di nasionalisasi dalam rangka perjuangan merebut kembali Irian Barat. Perusahaan-perusahaan ini dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada masa ini pengusaha tionghoa terlihat kurang mendapat kesempatan untuk bergerak dalam usaha skala besar, tapi usaha perekonomian skala menengah dan kecil masih tetap dalam dominasi tangan mereka.

Kedekatan presiden Soekarno yang anti-kolonialis dengan Partai Komunis yang berideologi kekirian dan berorientasi ke Uni Soviet dan RRC yang secara tidak langsung memperluas ruang gerak PKI (Partai Komunis Indonesia) yang lebih dekat ke China dalam berbagai sektor pemerintahan dalam negeri.³⁸ Namun hal itu menjadi bomerang bagi orang Tionghoa di Indonesia, karena pada peristiwa kudeta pemerintahan Soekarno yang populer dengan peristiwa G30S (Gerakan 30 September) terjadi pembantaian massal terhadap para anggota PKI. Peristiwa ini menjadikan orang-orang Tionghoa di Indonesia sebagai kambing hitam atas peristiwa tersebut karena kedekatan PKI dengan RRC dan menganggap semua orang Tionghoa adalah komunis. Peristiwa tersebut menimbulkan perpecahan antara orang Tionghoa dengan Pribumi dan menanamkan kebencian terhadap orang Tionghoa yang dipandang sebagai komunis hingga menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap orang Tionghoa.

³⁸ Hermawas Sulistyono. *Palu dan Arit di Ladang Tebu, (Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan)*, Jakarta : Gramedia, 2003.hlm, 17.

E. Etnis Tionghoa Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Tumbangnya pemerintahan Soekarno yang anti kolonialis oleh kudeta kaum militer Indonesia yang pro barat akibat terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965 membuat hubungan Tionghoa dengan Pribumi semakin buruk. Orang-orang Tionghoa di Indonesia menjadi kambing hitam dalam sebuah kudeta politik yang terjadi dalam pemerintahan. Peranakan Tionghoa dianggap sebagai yang bertanggung jawab atas apa yang dituduhkan sebagai peranakan RRC yang cenderung komunis.³⁹ Hal ini juga membuat hubungan bilateral antara Tiongkok dengan Indonesia menjadi tidak harmonis.

Semua kegiatan organisasi-organisasi sosial politik Tionghoa seperti BAPERKRI dilarang oleh pemerintah. Dengan kebijakan asimilasi tersebut pemerintah memiliki pandangan bahwa semua organisasi Tionghoa cenderung eksklusif dan ingin mempersatukan orang-orang Tionghoa kedalam organisasi yang didominasi oleh orang pribumi. Hal ini mendorong sejumlah orang Tionghoa untuk bergabung dalam partai politik seperti Golkar atau partai pemerintah.

Pada masa ini, aspirasi politik Tionghoa lebih banyak pada urusan kebijakan ekonomi dan bisnis yang lebih menguntungkan warga Tionghoa ketimbang urusan lain karena hegemoni kekuasaan Orde Baru yang cukup kuat.⁴⁰ Politik Orde Baru terhadap Tionghoa mengandung dua dimensi: budaya dan ekonomi. Dalam bidang budaya ia memperkenalkan politik

³⁹ Leo Surtyadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, hlm, 144.

⁴⁰Choirul Mahfud. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. hlm. 272.

asimilasi total dengan menghapuskan tiga pilar budaya Tionghoa, yakni sekolah, organisasi dan media Tionghoa. Dalam bidang ekonomi penguasa ini memberikan kesempatan kepada etnis Tionghoa.⁴¹ Hal ini tentunya berhubungan erat dengan strategi besarnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Indonesia untuk memberikan legitimasi kekuasaannya.

Pada sektor ekonomi, liberalisasi ekonomi kembali dibuka pada zaman pemerintahan Orde Baru Soeharto sejak tahun 1967. Dengan membatasi orang-orang Tionghoa dalam bidang ekonomi, karena pemerintah memandang lebih mudah menguasai minoritas Tionghoa. Pengusaha-pengusaha Tionghoa kembali memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka, apalagi setelah pemerintah membuka pintu bagi masuknya modal asing. Para pemodal asing, demikian juga halnya dengan oknum jenderal-jenderal Soeharto yang memperoleh banyak uang dari hasil korupsi, khususnya yang mengendalikan perusahaan-perusahaan dagang negara hasil nasionalisasi, banyak yang memilih bekerjasama dengan pengusaha Tionghoa. Perluasan usaha perekonomian Tionghoa nampak sekali berkembang pesat sejak akhir tahun 1980an. Pada tahun 1989, Gordon Redding memperkirakan 70-75 persen dari total modal swasta di Indonesia di kuasai oleh pengusaha Tionghoa (Redding 1989).

⁴¹<http://pormadi.wordpress.com/2009/01/20/politik-pemerintah-indonesiadan-etnik-tionghoa/> diakses 23 Mei 2015.

Akibat dari kebijakan tersebut status ekonomi para pengusaha Tionghoa semakin melejit diatas orang-orang pribumi. Kesenjangan antara kedua golongan tersebut semakin jelas terlihat hingga muncul kembali pandangan terhadap orang-orang Tionghoa sebagai kelompok yang eksklusif dan sukar untuk menyatu dengan pribumi. Selain itu juga marak bermunculan para pejabat yang korup dan sering memeras para pengusaha Tionghoa, hal ini tentu saja menimbulkan berbagai pandangan yang negatif terhadap pribumi. Situasi semacam ini terus berlangsung hingga menjelang lengsernya kekuasaan Orde Baru pada masa Reformasi tahun 1998. Peristiwa tersebut diwarnai dengan penjarahan dan pembantaian yang menelan banyak korban dari etnis Tionghoa.

F. Etnis Tionghoa Pada Masa Reformasi

Peristiwa Mei 1998 merupakan momen berdarah warga Tionghoa. Karena sebuah kerusuhan besar anti Tionghoa selama 2 hari terjadi di Jakarta dan Solo secara besar-besaran.⁴² Tragedi ini merupakan suatu bencana yang mungkin sulit dilupakan oleh warga Indonesia keturunan Cina. Peristiwa yang menyebabkan ratusan warga keturunan Cina meninggalkan Jakarta itu merupakan suatu bukti ketidak harmonisan hubungan antar etnik dibalik jargon-jargon keberhasilan proses pembauran dan keharmonisan hubungan antar etnik. Pembantaian serta pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa dilakukan secara sistematis. Bahkan pemerkosaan juga terjadi terhadap kaum

⁴² Leo Surtyadinata, *Etnis Tionghoa Dan Nasionalisme di Indonesia, (Sebuah Bunga Rampai 1965-2008)*. hlm, 201

perempuan keturunan Tionghoa, peristiwa tersebut menjadi momen terburuk dan sangat mengejutkan bagi masyarakat tionghoa dan dunia Internasional.

Namun tumbangnya rezim Orde Baru memberikan angin segar kepada kelompok etnis Tionghoa. Pemerintah zaman Reformasi berbeda dengan Pemerintah Orde Baru yang berusaha membangun hubungan yang harmonis antara orang-orang Cina dengan pribumi dengan melarang festival agama dan budaya yang berasal dari Cina daratan dengan peraturan pemerintah. Gus Dur justru menerbitkan kebijakan yang kontroversial dengan peraturan pemerintah Orde Baru. Gus Dur justru menghapus peraturan yang dianggap diskriminatif tersebut, hal ini dilakukan untuk mengembalikan hak-hak warga Cina untuk mengapresiasi kegiatan dalam bidang agama dan budaya. Pencabutan peraturan ini disambut dengan lega dan euphoria bagi warga Cina. Sejak itu festival yang berhubungan dengan budaya Cina dilakukan secara terbuka. Misalnya perayaan Hari Raya Imlek diselenggarakan secara besar-besaran di berbagai kota.

Bahkan sepuluh tahun setelah reformasi, kegiatan-kegiatan semacam ini semakin semarak dan variatif. Misalnya selain upacara keagamaan di Kelenteng, warga Cina juga menyelenggarakan perayaan dengan berbagai hiburan bernuansa oriental yang dimodifikasi, misalnya penampilan *Chinese Drum* dari *Group Dong Fang Shen Yun* di Atrium Supermall Pakuwon Indah (SPI) tanggal 22 Januari 2012. Kegiatan lain, misalnya diadakannya kursus-kursus bahasa Cina yang diikuti oleh anak-anak orang Cina maupun pribumi. Di izinkannya mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini nampaknya baik

sekali dalam rangka menghapus diskriminasi dan memperkenalkan budaya dan tradisi Cina kepada masyarakat Indonesia, sehingga akan muncul pemahaman bagi masyarakat pribumi.⁴³

Namun demikian hal ini sempat mengkhawatirkan berbagai pihak, misalnya dari kalangan mahasiswa dan pemerhati masalah sosial budaya Cina ada kekhawatiran bahwa dengan semakin berkembangnya kebebasan untuk mengekspresikan budaya mereka akan menimbulkan perubahan orientasi budaya mereka, dan terjadi resinifikasi dan revitalisasi budaya Cina yang bisa mengancam asimilasi. Strategi apa yang diperlukan agar dalam rangka kebebasan berekspresi ini masih tetap dalam bungkus asimilasi dan integrasi. Ini merupakan topik yang menarik untuk diteliti namun rupanya jarang sekali yang tertarik untuk meneliti masalah etnisitas tersebut.⁴⁴

Seiring dengan dinamika politik yang terjadi di tanah air kondisi sosial dan politik di Era Reformasi mengalami perubahan yang mencolok bila dibandingkan dengan era sebelumnya. Peristiwa 1998 juga menjadi momentum positif bagi banyak kalangan, terutama masyarakat Tionghoa ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi dan partai politik.⁴⁵ Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini menandai kebangkitan partisipasi sosial dan politik dari berbagai golongan, dan tentunya ini sangat menarik dan perlu mendapat apresiasi.

⁴³ Tomi Sujatmiko, dalam artikel Perbedaan Pribumi dan Non Pribumi Sudah Kuno, kedaulatan rakyat. Kamis, 19 Februari 2015

⁴⁴ Tomi Sujatmiko, dalam artikel Perbedaan Pribumi dan Non Pribumi Sudah Kuno, kedaulatan rakyat

⁴⁵ Choirul Mahfud. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. hlm, 2.

BAB III

ETNIS TIONGHOA DI YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Tidak seperti kerajaan pada umumnya, kesultanan mataram islam yang sekarang di kenal sebagai Yogyakarta terletak jauh dari pantai yang banyak dilakukan kerajaan-kerajaan lain sebagai pusat perkembangan ekonomi. Hal ini tentunya sudah dipertimbangkan matang-matang oleh para pendiri kesultanan, diantaranya adalah untuk menjauhkan rakyatnya dari pengaruh yang datang dari luar, karena banyak kerajaan-kerajaan yang hancur akibat banyaknya pengaruh dari luar. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan sebuah yang diselimuti sinar matahari tropis sepanjang tahunnya, daerah ini terletak di wilayah Jawa Tengah di bagian selatan pulau Jawa. Di bagian ujung selatan daerah ini bersentuhan langsung dengan samudera hindia, sedangkan di ujung bagian utara menjulang tinggi kawah gunung merapi yang senantiasa mendidih.⁴⁶

Hal ini sering dikaitkan dengan kejayaan dan kekuasaan yang begitu besar yang di peroleh Kerajaan Mataram oleh sebagian besar warganya. Daerah yang berdiri di bawah naungan Kesultanan Yogyakarta ini dulunya merupakan wilayah teritorial Kerajaan Mataram yang terpecah menjadi dua wilayah yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta akibat

⁴⁶ Rezza Maulana, Pergulatan Menjadi Muslim Sejati, *“Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga Orang Tionghoa Muslim di Yogyakarta”*. Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Ushuluddin

perjanjian Gianti pada tahun 1755.⁴⁷ Pada awalnya Mataram merupakan suatu kerajaan atau kawasan politik yang berdaulat dan merdeka. Namun setelah kedatangan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) sebuah perusahaan hindia belanda pada abad 16 secara berangsur-angsur kehilangan kedaulatannya.⁴⁸

VOC yang menerapkan perdagangannya dengan menguasai suatu pemerintahan untuk melindungi kepentingan dagangnya di suatu wilayah jajahan datang disertai dengan angkatan bersenjata. Sejak kedatangannya di pulau Jawa, hingga tahun 1755. VOC telah membuat 111 perjanjian dagang dengan kerajaan mataram.⁴⁹ Berbagai perjanjian yang dibuat sebagian besar merupakan perjanjian dagang.

Wilayahnya meliputi sekitar 3.100 km², termasuk 105 km² daerah *enclave* yang dulunya termasuk dalam wilayah kesultanan Surakarta dan Mangkunegara.⁵⁰ Dari 3.100 km² ini lebih dari separuhnya yakni 1.784 km² di gunakan sebagai lahan pertanian dan 838 km² di gunakan sebagai pemukiman penduduk, dan sisanya sekitar 478 km² merupakan wilayah hutan belantara yang sebagian dimanfaatkan untuk jalan-jalan dan penggembalaan hewan ternak oleh warganya. Daerah ini terbagi menjadi empat Kabupaten yang mengelilingi satu wilayah Ibukota yaitu Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan. Empat Kabupaten tersebut meliputi kabupaten Kulon Progo di

⁴⁷Darmasugito. *Kota Jogjakarta 200 tahun*, Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun, 1956, hlm 6

⁴⁸Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Terj. Mochtar Pabotinggi. Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2009. Hlm, 11.

⁴⁹Darmasugito. *Kota Jogjakarta 200 tahun*, hlm 7

⁵⁰Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. hlm 3.

bagian barat, kabupaten Sleman di bagian utara, kabupaten Bantul di bagian tengah dan Gunung Kidul di bagian selatan.

Table 1.1 Kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1956

Kabupaten atau Kota	Daerah dalam km persegi	Jumlah Penduduk	Kepadatan/km persegi
Kota Yogyakarta	36,90	282.811	7.588
Bantul	419,09	451.285	1.078
Sleman	554,65	489.625	825
Gunung Kidul	1.428,61	504.977	367
Kulon Progo	558,22	330.306	593
Daerah Istimewa Yogyakarta	2.997,42	2.059.004	683

Sumber : Selo Soemardjan, 2009, hlm. 6-7

Pada tabel tersebut menunjukkan angka penyebaran dan perbandingan penduduk di berbagai wilayah DIY yang belum cukup merata antara daerah satu dengan yang lain.

Layaknya kota-kota di wilayah Indonesia pada umumnya, di Yogyakarta terdapat berbagai etnis baik dari wilayah Indonesia maupun luar Indonesia seperti Cina, Eropa dan Arab. Berbagai etnis tersebut sudah lama menetap di wilayah ini, bahkan sebelum berdirinya kota Yogyakarta salah satunya etnis Tionghoa yang sudah berdiam dan ikut berperan penting dalam perekonomian di wilayah ini sejak masa Kerajaan Mataram. Hingga berdirinya kota Yogyakarta etnis Tionghoa di wilayah ini semakin berkembang pesat, terutama di pusat-pusat perkotaan karena sebagian besar etnis Tionghoa adalah pedagang.

Pada tahun 1920 jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta sebesar 7.250 jiwa. Orang Tionghoa yang tinggal di pusat perkotaan sebesar 5.471 dan sisanya tinggal di pedesaan.⁵¹

Tabel 1.2 Jumlah Orang Tionghoa di Yogyakarta

Tahun	Dalam Kota	Luar Kota
1905	5.366	100
1920	5.471	1.779
1925	5.584	1.985
1930	9.189	3.448

Sumber : Volkstelling, 1930. R. harjono, hlm.12-13.

Pertumbuhan warga Tionghoa meningkat pada sensus tahun 1930 warga Tionghoa di Yogyakarta mencapai 12.637 sekitar 9.189 jiwa menepati daerah perkotaan dan sebagian lainnya tersebar di berbagai daerah pedesaan DIY. Karena kedatangannya dengan beberapa gelombang pelayaran, warga Tionghoa yang ada di Yogyakarta terdiri dari berbagai suku berbeda yang berasal dari berbagai daerah di dataran Cina. Di Yogyakarta sendiri terdapat empat suku asal Cina yaitu: Hokkian, Kwongfu, Hakka dan Teochiu.⁵²

Table 1.3 Orang Tionghoa Berdasarkan Suku di Yogyakarta 1930

No	Suku	Lahir di Yogyakarta		Lahir di tempat lain	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Hokkian	3.089	3.112	1.483	154
2	Hakka	54	46	107	33
3	Teochiu	35	48	45	12
4	Khongfu	220	196	487	159
5	Lain-lain	1212	1277	273	44

Volkstelling, 1930. R. Hardjono, hlm. 25

⁵¹Sensus penduduk 1920 dikutip dalam Gegevens. 1925. P 138-145. R. harjono, hlm 12

⁵²Volkstelling, 1930, hlm. 9.

Seiring dengan perkembangannya jumlah orang Tionghoa terus bertambah dari masa-kemasa. Bertambahnya penduduk Tionghoa ini terlihat dari data tahun 1969 bahwa di Kota Yogyakarta ada sejumlah 15.056 jiwa penduduk Tionghoa yang terdiri dari 11.449 WNI dan 3.647 WNA yang terpusat di Kecamatan Gondomanan.⁵³ Hal ini terjadi akibat diberlakukannya kebijakan Pemerintah Soekarno yakni Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959) yang melarang kegiatan pengusaha kecil bangsa asing di kawasan di bawah tingkat Kabupaten.⁵⁴ Diberlakukannya peraturan ini secara tidak langsung mendorong orang-orang Tionghoa dari berbagai wilayah pedesaan bermigrasi ke daerah perkotaan, dan kota Yogyakarta menjadi salah satu tujuan utama.

Table 1.4 Jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta menurut area tempat tinggal

No	Kota/kabupaten	Area			
		Perkotaan		Pedesaan	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kulon Progo	7	4	5	4
2	Bantul	398	370	4	4
3	Gunung Kidul	29	37	3	3
4	Sleman	1402	1364	-	-
5	Kotamadya	3012	3243	40	36
	Jumlah	4848	5018	40	36

Sumber : Sensus tahun 2000, BPS Pusat

Setelah berakhirnya pemerintahan Soekarno yang telah digulingkan oleh pemerintah Orde Baru, terdapat penurunan jumlah orang Tionghoa yang

⁵³ R. Hardjono, “*Komuniti Tionghoa Yogyakarta: Sejarah Minoritas Lokal dengan Focus Sosiologis*”, Skripsi di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, 1970. hlm. 9

⁵⁴ Charles A. Copel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 82

cukup signifikan. Hal ini di tengarai akibat dari dikeluarkannya kebijakan asimilasi oleh pemerintah Orde Baru. Tidak sedikit orang Tionghoa atau keturunan yang telah telah menikah dengan pribumi dan resmi menjadi WNI tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang Tionghoa. Penurunan jumlah tersebut juga terjadi akibat banyaknya Orang Tionghoa yang mengungsi ke luar negeri dan menjadi korban dari pembantaian pada tragedi 30 September 1965 oleh kaum militer terhadap PKI.

Tabel 1.5 Jumlah penduduk Tionghoa di Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota dan kewarga negaraan.

No	Kabupaten/Kota	Suku Bangsa Tionghoa			
		WNI		WNA	
		L	P	L	P
1	Kulon Progo	11	7	1	1
2	Bantul	347	327	55	47
3	Gunung Kidul	29	40	3	-
4	Sleman	1312	1304	118	85
5	Kotamadya	2927	3150	85	93
	Jumlah	4626	4828	262	226

Sumber: Sensus 2000, BPS Pusat

Untuk keberagaman orang Tionghoa di Yogyakarta belum diketahui secara jelas. Hal ini terjadi karena perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan pada masa kolonial tidak mencantumkan kategori agama. Namun menurut perhitungan pada masa orde baru yakni pada tahun 1970an, dalam bukunya H. Junus Jahja memperkirakan hanya 0,5% sari keseluruhan jumlah

penduduk Tionghoa di Indonesia saat itu berkisar 2,5 juta jiwa atau sebesar 12.500 jiwa.⁵⁵

Namun pasca pemerintah Orde Baru, diperkirakan jumlah muslim yang ada di Yogyakarta diperkirakan mencapai 10% dari jumlah keseluruhan orang Tionghoa yang ada di Yogyakarta.⁵⁶ Berdasarkan perhitungan sensus tahun 2000, jika jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta sebesar 9.942 jiwa. Maka jumlah orang Tionghoa muslim di yang tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta mencapai 990 jiwa.

B. Kondisi Sosial Etnis Tionghoa dan Pribumi di Yogyakarta

a) Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Yogyakarta

Seperti yang di kemukakan oleh para ahli dalam penelitian terhadap masyarakat Tionghoa, pada umumnya membagi etnis Tionghoa menjadi dua golongan yaitu totok dan peranakan. Skinner menggolongkan orang Tionghoa berdasarkan haluan budaya dan pemikiran orang Tionghoa.⁵⁷ Orang totok adalah mereka yang berorientasi pada negeri Cina (sekarang disebut Tiongkok) meskipun lahir di Indonesia. Sedangkan Tionghoa peranakan adalah mereka yang tinggal bersama masyarakat setempat dan menerapkan pola budaya masyarakat setempat.

⁵⁵ Junus Jahja, *3 Tahun Dakwah di Kalangan Keturunan Tionghoa*. dalam Junus Jahja (editor), *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, (Jakarta: YUI, 1984), hlm. 304

⁵⁶ Triana Yudawati, "*Relasi Sosial Muslim Tionghoa dan Non Muslim Tionghoa di Kodya Yogyakarta*", Skripsi di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002. hlm 12

⁵⁷ G. William Skinner, *The Chinese in Indonesia*, dalam Rurh McVey (ed.), *INDONESIA*, (New Heaven: Connecticut, 1963), hlm. 105-106

Namun Charles Coppel membedakan golongan ini berdasarkan tiga aspek.⁵⁸ Pertama berdasarkan ras. Orang Tionghoa adalah orang Tionghoa asli sedang peranakan adalah orang Tionghoa hasil kawin campur dengan penduduk setempat. Kedua, tempat kelahiran. Tionghoa totok lahir di negeri Cina sedangkan Tionghoa peranakan lahir di Indonesia. Ketiga adalah berdasarkan aspek sosial cultural. Tionghoa totok masih berbahasa mandarin dan memegang teguh tradisi China, sedangkan tionghoa keturunan sudah berbaur dan bercampur dengan tradisi setempat dan menggunakan bahasa masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan masyarakat pribumi di Yogyakarta merupakan sebuah kelompok masyarakat yang santun dan juga terbuka dan menerima segala sesuatu yang masuk kedalamnya, sehingga sangat mudah bagi yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya untuk berbaur dan berinteraksi dengan baik. Masyarakat pribumi cenderung terbuka dan menerima kedatangan etnis Tionghoa dengan baik. Walaupun sebagian masih susah menerimanya dengan baik karena berbagai perbedaan baik karakter maupun kebudayaan.

Keberagaman orang Tionghoa di Yogyakarta memang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, karena pada dasarnya mereka juga berasal dari beberapa suku yang berbeda. Selain karena kedatangannya yang bertahap dari beberapa periode pelayaran, mereka juga berasal dari berbagai daerah yang berbeda dari dataran China. Dengan demikian ada beberapa suku yang

⁵⁸ Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm,23-25

berbeda dengan budaya yang juga beragam dari kalangan orang Tionghoa yang ada di Yogyakarta ini. Keberagaman tersebut juga berpengaruh terhadap pola interaksi dan akulturasi yang terjalin antara orang Tionghoa dengan penduduk setempat. Ada yang dengan mudah menyatu dengan budaya lokal (Jawa) dan sebaliknya masih ada juga yang sukar untuk membaaur dengan kebudayaan lokal bahkan cenderung eksklusif.

Dengan demikian, tidak sedikit kebudayaan China yang berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dan membentuk budaya sendiri. Wayang yang kita kenal dalam masyarakat Jawa ternyata juga dapat kita temukan di kalangan Tionghoa. Dari sekian banyak wayang yang ada di Indonesia beberapa di antaranya adalah hasil akulturasi kebudayaan China dan Jawa diantaranya wayang Potehi dan wayang kulit Cina-Jawa.⁵⁹ Keberadaan wayang Potehi dan wayang kulit Cina-Jawa sudah cukup lama. Mereka biasa digelar di klenteng-klenteng Cina di Pulau Jawa. Keduanya mengisahkan mitos dan legenda Tiongkok seperti *Sam Kok*, *San Pek Eng Tai*, *Li Si Bin*. Bahasa yang digunakan, bahasa Melayu untuk wayang Potehi dan bahasa Jawa untuk wayang kulit Cina-Jawa.

Wayang kulit Cina-Jawa lahir di Yogyakarta tahun 1925 dan diciptakan oleh Gan Thwan Sing. Bahasa pengantar adalah bahasa Jawa. Musik

⁵⁹ Dwi Woro R. Mastut, *Wayang Cina di Jawa Sebagai Wujud Akulturasi Budaya dan Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia di PNRI, Jakarta 12 Oktober 2004.hlm. 1

karawitannya gamelan Jawa.⁶⁰ Kedua Jenis wayang tersebut merupakan wujud akulturasi budaya di nusantara. Namun kedua wayang tersebut telah terabaukan, bahkan pada era ini keduanya sudah tidak terdengar lagi. Banyak aspek yang melatarbelakangi kepunahan kedua wayang tersebut, salah satunya aspek politik. Seperti yang telah penulis katakana pada bab sebelumnya, akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang larangan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina, secara tidak langsung menghalangi perkembangan kebudayaan Cina.

Namun setelah dicabutnya Instruksi Presiden tersebut oleh Presiden Abdur Rahman Wahid pada tahun 2000, berbagai kesenian dan kebudayaan Cina mulai berkembang lagi. Bahkan tidak sedikit masyarakat pribumi yang mempelajarinya bahkan mengadakan pertunjukan kesenian Cina tersebut. Lagu-lagu Mandarin mulai banyak diputar di radio lokal, buku-buku terbitan yang beraksara mandarin juga mulai bermunculan.⁶¹

b) Kehidupan sosial keagamaan masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Yogyakarta

Dalam penelitian yang dilakukan Sumanto Al Qurtubi eksistensi Tionghoa Muslim pada awal perkembangan Islam di Jawa tidak hanya ditunjukkan oleh kesaksian-kesaksian para pengelana asing, sumber-sumber Cina, teks lokal Jawa maupun tradisi lisan saja, melainkan juga dibuktikan

⁶⁰ B. Soelarto dan S. Ilmi Albiladiyah. *Wayang Cina-Jawa Yogyakarta*. Depdikbud, Jakarta, 1980/1981.

⁶¹ Benny Dwi Koestanto, (PBT 2006, Layak Jadi Laboratorium Sosial”, dalam *KOMPAS JOGJA*, 20 Januari 2006.

dengan berbagai peninggalan purbakala islam Jawa. Ini mengisyaratkan adanya pengaruh yang sangat kuat dari Cina yang di temukan dalam adanya ukiran padas di masjid kuno mantingan jepara, menara masjid pecinan Banten, arsitektur keraton cirebon beserta taman sunyaragi dan berbagai peninggalan kuno lainnya.⁶²

Namun akibat hegemoni yang dilakukan pemerintah kolonial membelokkan pandangan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa sebagai suatu kelompok masyarakat ideentik dengan kepercayaan konghucuisme. Kelompok ini di mata masyarakat pribumi dipandang sebagai kelompok yang cenderung eksklusif dan cenderung kikir. Di Indonesia pada umumnya terdapat tiga kepercayaan yang melekat erat pada kelompok etnis Tionghoa, kepercayaan tersebut adalah agama Budha, Taoisme dan Konfusianisme.⁶³ Salah satu yang paling berpengaruh dan mendarah daging dalam kehidupan sehari hari di kalangan masyarakat Tionghoa adalah ajaran Konfusianisme. Begitu kentalnya pengaruh kepercayaan tersebut tidak dapat di pungkiri lagi, karena di negeri asalnya ajaran ini telah di anut lebih dari dua ribu tahun lamanya.⁶⁴

Ikatan kekeluargaan di kalangan masyarakat Tionghoa sangat kuat yang membuat kelompok etnis tersebut cenderung eksklusif dan sukar berbaur dengan masyarakat di luar kelompok mereka. Hal ini dapat dipahami karena

⁶² Sumanto Al Qurtubi, Arus Cina-Jawa-Islam, *Bongkar Ssejarah Atas Peranan Tionghoa Dalam Penyebaran Agama Islam Di Nusantara Abad XV&XVI*. Yogyakarta: INSPEAL dan INTI, 2013

⁶³ P. Hariyono, *Kultur Cina di Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. hlm. 19

⁶⁴ P. Hariyono, *Kultur Cina di Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, hlm. 19

pengaruh kepercayaan yang mereka anut. Dalam kepercayaan Konfusius ada sebuah ajaran sistem familiisme yang secara umum memberikan pengertian bahwa segala sesuatu itu dilakukan untuk kepentingan dan ditunjukkan kepada keluarga.⁶⁵ Dengan kata lain mereka selalu menjunjung tinggi kepentingan keluarga di atas kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, bangsa atau Negara dan bahkan kepentingan pribadi.

Sementara warga pribumi yang sebagian besar beragama Islam, namun masih kental dengan kebudayaan hindu budha karena sudah berabad-abad dari nenek moyang mereka menganut ajaran hindu budha. Karakter mereka cenderung lebih terbuka dan menerima berbagai kebudayaan yang masuk kedalamnya, sehingga tidak sulit bagi masyarakat Tionghoa untuk masuk dan berbaur di lingkungan mereka,

Seiring perkembangannya kelompok masyarakat Tionghoa di Yogyakarta menunjukkan keragamannya dalam hal keberagaman. Diantaranya terdapat pemeluk agama Kristen (Protestan) yang memegang erat dan menjalankan ajaran agamanya dengan sangat ketat. Ketaatannya dalam menjalankan ajaran agamanya membawanya pada penghayatan terhadap nilai-nilai familiisme yang di wariskan oleh generasi sebelumnya.⁶⁶ Namun sebaliknya yang beragama Katolik cenderung memiliki pemikiran yang bebas dan terbuka terhadap pengaruh dari luar untuk memperoleh hal-hal baru. Hal inilah yang membuat mereka terlepas dari ikatan kelompok dan aturan-aturan dalam

⁶⁵ P. Hariyono, *Kultur Cina di Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, hlm. 83

⁶⁶ P. Hariyono, *Kultur Cina di Jawa, Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, hlm. 149

keluarga, khususnya nilai-nilai yang bersifat tradisional seperti nilai-nilai familiisme. Begitu pula dengan orang Tionghoa yang memeluk agama Islam, mereka tidak mempunyai tingkat familiisme yang tinggi karena dalam ajarannya tidak pembentukan nilai-nilai familiisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

Kecenderungan dalam keberagaman yang ada dalam masyarakat Tionghoa, menciptakan tingkatan interaksi terhadap masyarakat pribumi yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka yang masih memegang erat dan menjalani ajaran dan sifat tradisional Konfusius cenderung lebih tertutup dan memiliki tingkatan interaksi yang rendah dengan masyarakat pribumi. Sedangkan pemeluk agama katolik dan Islam yang cenderung lebih terbuka dan memiliki tingkatan interaksi yang tinggi dan bahkan dapat menyatu dengan warga pribumi.

Bahkan di kalangan Tionghoa muslim, karena adanya kesamaan agama dengan warga pribumi yang mayoritas muslim, ada yang benar-benar menyatu dengan masyarakat setempat dan enggan di sebut sebagai orang Tionghoa. Namun ada juga sebagian Tionghoa muslim yang berafiliasi dalam suatu organisasi yang kental dengan ke-Tionghoan, salahsatu yang menonjol adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).⁶⁷

c) Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tionghoa dan Pribumi di Yogyakarta

⁶⁷ Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1998, hlm. 95

Sebelum berdirinya kota Yogyakarta orang-orang Tionghoa sudah banyak tersebar di wilayah Yogyakarta yang dulunya masih dalam daerah teritorial Kerajaan Mataram, terutama di pusat-pusat perekonomian. Hingga diresmikannya kota Yogyakarta akibat perjanjian Giyanti pada tahun 1755 orang-orang Tionghoa mulai banyak berdatangan dari berbagai daerah. Keberadaan orang-orang Tionghoa turut berperan penting dalam perkembangan perekonomian di wilayah Yogyakarta.

Adanya peraturan yang melarang kegiatan ekonomi orang Tionghoa pada bidang non-komersil pada era orde baru mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang perdagangan. Berbagai peraturan yang diberlakukan melalui Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa dianggap mendiskriminasi warga Tionghoa. Hingga pasca kemerdekaan Indonesia masih dikeluarkan perundangan serupa, salah satunya PP NO 10 1959 (Peraturan ini melarang pedagang eceran asing (Tionghoa) untuk beroperasi di wilayah pedesaan).⁶⁸ Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak pemerintahan Hindia Belanda yang mengeluarkan *Wijkenstesel* pada tahun 1835 yang berisi perintah untuk menempatkan orang Tionghoa pada suatu area khusus/pecinan. Ada juga Undang-Undang Agraria pada 1870 yang berisi larangan bagi orang Tionghoa untuk menjadi petani. Di Yogyakarta sendiri dikeluarkan Staatblad 1891 No. 214 (Peraturan tersebut

⁶⁸ Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau di Indoesia*, Jakarta: Garba Budaya, 1999, hlm 132

bertujuan untuk membatasi jumlah orang Tionghoa yang ingin masuk ke daerah Yogyakarta, kecuali dengan prosedur khusus).⁶⁹

Namun di Yogyakarta sendiri, hubungan hubungan elite pemerintahan khususnya Kesultanan dengan masyarakat Tionghoa cenderung baik. Hal ini terlihat dari adanya beberapa tokoh penting dalam kesultanan Yogyakarta yang merupakan keturunan Tionghoa. Bahkan selir Hamengku Buono II berasal dari keturunan Tionghoa.⁷⁰ Banyak di antara orang-orang Tionghoa yang berdekatan dengan kesultanan mendapat gelar kebangsawanan dan juga menjadi pejabat pemerintahan. Salah satunya diangkatnya seorang kapitan Cina Tan Jin Sing sebagai Bupati Yogyakarta dan mendapatkan gelar kebangsawanan K.R.T. Secodiningrat. Hubungan baik antara Kesultanan Yogyakarta dengan Orang-orang Tionghoa juga diabadikan dalam prasasti dari batu marmer yang didatangkan dari negeri Cina sebagai persembahan kepada Sri Sultan Hamengku Buono IX saat peringatan pengangkatannya sebagai Raja di Kesultanan Yogyakarta. Prasasti tersebut masih tersimpan dan terpelihara dengan baik di kompleks istana.

Keberhasilannya dalam bidang bisnis merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mereka membuktikan diri bahwa mereka orang yang cerdas dan rajin dalam mencari kekayaan. Meskipun populasinya masih sangat sedikit dibandingkan dengan warga pribumi, namun karena pada umumnya

⁶⁹ R. Hardjono, *Komuniti Tionghoa Yogyakarta: Sejarah Minoritas Lokal dengan Focus Sosiologis*. hlm. 29

⁷⁰ Andreas Susanto, *Orang Cina di Yogyakarta: Antara Penerimaan dan Penolakan*, dalam I. Wibowo (ed) *Harga Yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia – Pusat Studi Cina UI, 2001), hlm. 79

profesi mereka sebagai pedagang dan mobilitasnya sangat tinggi keberadaan mereka cukup di perhitungkan. Kemapanan dalam bidang ekonomi tersebut membuat hubungan mereka dengan para pejabat pemerintahan begitu dekat.

Dalam penguasaan di bidang ekonomi kelompok etnis Tionghoa cenderung seimbang dengan para pengusaha pribumi. Persaingan dalam bidang usaha baik menengah maupun berskala besar juga relative kecil bahkan hampir tidak ada persinggungan. Hal ini karena pada umumnya pengusaha pribumi lebih banyak terjun dalam bisnis batik, perhotelan, kerajinan perak, pom bensin, jasa pariwisata, dan cinderamata. Sedangkan pengusaha Tionghoa lebih dominan dalam bisnis mobil, motor, bengkel dan onderdil, barang elektronik, emas, pabrik tekstil, toko besar dan bangunan.⁷¹ Bahkan di sepanjang jalan Malioboro, di depan toko milik orang Tionghoa terdapat pedagang kaki lima yang berjualan secara berdampingan. Hal ini juga menunjukkan kedekatan antara pengusaha Tionghoa dengan pedagang pribumi.

⁷¹ Budi Susanto, *Identitan dan Postkolonialisme di Indonesia*, Yogyakarta: kanisiun. 2003. hlm.82-83

BAB IV

INTERAKSI SOSIAL ETNIS TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT PRIBUMI DI KOTAYOGYAKARTA

A. Interaksi sosial etnis Tionghoa dengan masyarakat Pribumi di kota Yogyakarta

Pada mulanya orang Tionghoa hanya menempati pemukiman-pemukiman khusus orang Tionghoa sehingga intensitas interaksi yang terjalin dengan warga pribumi hanya terbatas pada interaksi perdagangan. Namun seiring perkembangan kota Yogyakarta orang-orang Tionghoa mulai tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta, mereka tersebar di jalan-jalan utama kota Yogyakarta dan berbaur dengan warga di sekitar tempat tinggalnya. Komunitas Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta dalam kehidupan sehari-hari sering diterima sekaligus di tolak oleh masyarakat pribumi. Penolakan yang dialami dapat datang dengan berbagai alasan, misalnya kecemburuan, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya. Orang Tionghoa kurang bergaul dengan alasan kesibukan pekerjaan. Salah satu sifat positif orang Tionghoa adalah pekerja keras, sehingga jika mereka bekerja sering kurang melihat waktu dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya sosial. Etnis Tionghoa sejak kedatangannya ke Yogyakarta sudah terkenal dengan mata pencahariannya dengan berdagang, juga terkenal sudah turun menurun tinggal di Yogyakarta, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi.

Seperti yang kita ketahui pada umumnya, orang-orang Tionghoa di Yogyakarta mayoritas adalah sebagai pedagang, baik pedagang kecil maupun

pedagang dengan skala besar. Hal ini secara tidak langsung mendorong orang-orang Tionghoa untuk tetap menjalin relasi dengan warga pribumi untuk kepentingan perdagangan mereka. Untuk mempermudah urusan dagang mereka harus menjalin hubungan yang baik dengan warga pribumi. Seiring dengan perkembangan kota Yogyakarta orang-orang Tionghoa mulai tersebar tidak hanya di kompleks-kompleks pecinan namun juga di berbagai wilayah di kota Yogyakarta.

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan terhadap interaksi sosial yang terjalin antara orang-orang Tionghoa dengan warga pribumi di kranggan, yakni kompleks pemukiman orang-orang Tionghoa di pusat kota Yogyakarta, terlihat sebuah kesenjangan dalam interaksi yang terjalin antara keduanya. Kegiatan perdagangannya membuat mobilitas mereka sangat tinggi sehingga membuat pergaulan mereka dengan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka sangat jarang terjadi. Orang-orang Tionghoa terlihat cenderung eksklusif dan tertutup terhadap warga pribumi. Mereka (orang Tionghoa) yang pada umumnya lebih unggul dalam perekonomian cenderung lebih sibuk dengan pergaulannya dengan sesama orang Tionghoa dengan urusan bisnisnya. Anak-anak mereka juga di masukkan dalam sekolah-sekolah unggulan dengan murid-murid yang kebanyakan dari golongan mereka. Hal ini secara tidak langsung menutup pergaulan mereka dengan anak-anak keturunan pribumi yang pada umumnya bersekolah di sekolah-sekolah umum.

Karena sikapnya dalam pergaulan sehari-hari yang cenderung tertutup ini stereotip terhadap orang-orang Tionghoa yang eksklusif semakin subur tertanam

pada warga pribumi. Sebagian besar orang pribumi menganggap orang-orang Tionghoa sebagai kelompok yang eksklusif dan hanya mengumpulkan harta dan melupakan kehidupan sosialnya. Walaupun sebagian orang Tionghoa mempekerjakan orang pribumi dalam usaha perdagangannya namun intensitas hubungan yang terjalin antara keduanya kurang begitu baik. Beberapa warga pribumi yang penulis wawancarai mengungkapkan bahwa hubungannya dengan orang-orang Tionghoa hanya sebatas partner kerja dan relasi sosial yang terjalin hanya untuk kepentingan ekonomi bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal di wilayah kompleks Tionghoa atau pecinan, orang-orang Tionghoa yang tinggal di luar wilayah itu cenderung lebih terbuka dan tidak lagi eksklusif. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi yang terjalin dengan warga pribumi juga lebih terbuka sehingga membuat hubungannya dengan warga pribumi juga lebih baik. Ini terlihat pada interaksi yang terjadi antara orang-orang Tionghoa yang bermukim satu tempat dengan orang pribumi di beberapa pemukiman yang mayoritas dihuni oleh orang-orang pribumi. Orang-orang Tionghoa yang tinggal di pemukiman tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada dan berbaur tanpa suatu sekat yang menghalangi interaksi yang terjalin.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang orang-orang Tionghoa juga menggunakan bahasa Jawa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Bahkan dalam lingkungan keluarga orang-orang Tionghoa juga lebih banyak memakai bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan sesama orang Tionghoa. Tidak jarang juga bahasa Jawa yang digunakan termasuk bahasa Jawa *ngoko*

(bahasa Jawa yang halus) yang biasa digunakan oleh masyarakat pribumi. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan seseorang untuk saling berinteraksi. Bahasa Jawa memiliki suatu sistem tingkat-tingkat yang sangat rumit, terdiri dari paling sedikit sembilan gaya bahasa. Sistem ini menyangkut perbedaan-perbedaan yang wajib digunakan, mengingat perbedaan kedudukan, pangkat, umur, serta tingkat keakraban antara yang menyapa dan yang disapa. Dalam konsepsi orang Jawa, berbagai gaya ini menyebabkan adanya tingkat-tingkat bahasa yang berbeda-beda tinggi rendahnya. Tiga gaya yang paling dasar, yaitu gaya tidak resmi, gaya setengah resmi, dan gaya resmi (Ngoko, Madya, dan Krama).⁷²

Dalam hal ini terlihat adanya usaha orang-orang Tionghoa melakukan proses Asimilasi (Assimilation) yaitu sebuah usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan.⁷³ Dalam hal ini terlihat adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara mereka yang dilakukan oleh orang Tionghoa yang tinggal di pemukiman masyarakat pribumi agar dapat berbaur dan menyatu dengan warga pribumi. Proses asimilasi tersebut terlihat jelas pada segi bahasa Jawa yang banyak dikuasai orang-orang Tionghoa dan juga digunakan dalam praktiknya sehari-hari saat berinteraksi dengan warga pribumi. Proses asimilasi ini berhasil menghilangkan sekat antara kedua kelompok etnis tersebut dalam interaksi yang dilakukan sehari-hari.

⁷² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 21-22

⁷³ Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, 2010. hlm. 64

Dari berbagai pola interaksi yang ada, terlihat perbedaan yang mencolok antara orang Tionghoa yang tinggal di daerah pemukiman Tionghoa dengan orang Tionghoa yang tinggal di luar daerah tersebut. Orang Tionghoa yang tinggal di daerah khusus pecinan cenderung terlihat lebih eksklusif dan sukar untuk menyatu dengan orang-orang pribumi. Sementara orang Tionghoa yang tinggal di luar pemukiman Tionghoa lebih dapat menyatu dengan warga pribumi.

B. Pengaruh konflik terhadap interaksi sosial yang terjalin antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi di kota Yogyakarta

Bila dibandingkan dengan orang-orang Tionghoa di negara lain, orang-orang Tionghoa di Indonesia menunjukkan dinamika tersendiri. Dibandingkan dengan keadaan orang-orang Tionghoa di beberapa negara tetangga seperti Philipina ataupun Thailand, dimana orang Tionghoa sudah berakulturasi dan menjadi warga pribumi, maka posisi etnis Tionghoa di Indonesia nampaknya belum menemukan format yang tepat. Di Indonesia kelihatannya masih berlaku istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan etnis Tionghoa dengan etnis pribumi yang lain. Sementara terhadap etnis pendatang lain seperti Arab, India, istilah non pribumi ini nampaknya tidak berlaku. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh para penguasa sejak zaman kolonial membuat kedudukan etnis minoritas ini selalu saja tersudut baik itu di era kolonial maupun di era kemerdekaan.⁷⁴

⁷⁴ Susetyo, D.P.B. 2002 Stereotip Dan Relasi Antar Etnis Cina Dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Berbagai persaingan terjadi antara kedua kelompok masyarakat tersebut sehingga menimbulkan banyak pertentangan. Pertentangan (conflic) menurut Gillin merupakan sebuah proses sosial dimana individu atau kelompok sosial berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan terhadap pihak lain.⁷⁵ Hal ini sering terjadi antara kedua kelompok etnis tersebut akibat adanya pengaruh dari pemerintah kolonial yang berusaha mengadu domba kedua kelompok masyarakat tersebut. Akibatnya hingga saat ini hubungan antara kedua kelompok masyarakat tersebut ada suatu hal yang menghalangi mereka untuk hidup berdampingan tanpa adanya suatu sekat apaun yang menghalanginya.

Seiring dengan perkembangannya yang telah berbaur dengan warga pribumi, orang-orang Tionghoa di Yogyakarta mengalami banyak perubahan baik dari segi budaya maupun agamanya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berdampingan, ia akan selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh sesamanya. Dalam suatu kehidupan, manusia membentuk suatu kelompok yang di dalamnya terdapat suatu sistem yang sangat kompleks dan memiliki keunikan masing-masing. Sebagai suatu sistem, masyarakat terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan. Setiap sub sistem dengan peranannya dapat dipandang mutlak adanya, karena pada hakikatnya kesatuan itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang terpecah-pecah dan terbagi-bagi, namun keberadaannya saling mengokohkan satu sama lain. Secara umum masyarakat terdiri dari pranata-pranata sosial, struktur-struktur sosial, sistem nilai, norma, aturan, maupun

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, 2010. hlm. 64

kebiasaan itu akan mewujudkan tatanan kongkrit seperti: sub sistem politik, sub sistem ekonomi, sub sistem sosial, sub sistem budaya maupun sub sistem lainnya.

Perubahan sosial merupakan proses perkembangan unsur sosio, budaya dari waktu ke waktu yang membawa perbedaan berarti dalam struktur dan fungsi masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari suatu perubahan yang datang, baik dari kemajuan berpikir manusia maupun dari perubahan lingkungan dan teknologi. Perubahan masyarakat akan selalu terjadi dan dapat meliputi aspek-aspek kehidupan masyarakat. Inti dari proses perubahan masyarakat itu sendiri adalah adanya perubahan norma-norma atau adanya pergeseran pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat.

Dengan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat itu, maka anggota-anggotanya (warga masyarakat) akan berusaha mengatur strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat (perubahan sosial).⁷⁶

1. Perubahan kondisi geografis
2. Kebudayaan materiil
3. Komposisi penduduk
4. Perubahan ideologi maupun karena difusi ataupun penemuan penemuan baru dalam masyarakat

⁷⁶ Soerjono Soekanto. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987. hlm. 285

Dengan adanya berbagai interaksi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Pribumi, tidak dapat dipungkiri hal ini akan menimbulkan berbagai perubahan terhadap keduanya. Terjalannya hubungan baik antar kedua kelompok masyarakat tersebut mampu meredam berbagai konflik yang sering terjadi sebelumnya.

Keberadaan orang-orang Tionghoa di Yogyakarta perlu di hadirkan dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Peran dan kontribusi orang-orang Tionghoa selama ini perlu di beri ruang dan pengakuan. Dinamika kehidupan masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian dari sejarah Yogyakarta yang sejatinya mengarah pada integrasi antar etnis dengan menghadirkan peran berbagai kelompok dan golongan yang turut mewarnai kemajemukan.⁷⁷ Sejarah sebagai ingatan kolektif mengenai berbagai pengalaman bersama sebuah bangsa dapat memberi ikatan bagi identitas sosial yang menuntun arah yang lebih baik di masa depan. Tak hanya soal sejarah, orientasi multikulturalisme sebagai konsep ideal yang jelas tergambar dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus mampu mengakomodasi warga Tionghoa sebagai bagian integral Bangsa Indonesia.

Tidak seperti di daerah lain di Indonesia, hubungan antara etnis Tionghoa dengan orang pribumi di Yogyakarta terlihat cukup damai, hal ini terbukti dengan tidak pernah adanya konflik yang terjadi antara keduanya seperti di daerah-daerah lain. Ini tidak lepas dari peran kesultanan Yogyakarta yang secara tidak langsung

⁷⁷ Kurniawan Hendra, imlek dan integrasi bangsa, Kedaulatan Rakyat Yogya. <http://krjogja.com/liputan-khusus/opini/3805/imlek-dan-integrasi-bangsa.kr> diakses: 22-06-2015. 12:33

sangat berpengaruh terhadap kerukunan yang terjadi. Sejak awal masuknya orang Tionghoa di Yogyakarta seperti telah di bab-bab sebelumnya para pejabat dalam pemerintahan Yogyakarta sudah sangat dekat dengan orang-orang Tionghoa. Bahkan beberapa kapiten Tionghoa mendapat kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, salah satunya kapitan Tan Jin Sing yang mendapat jabatan sebagai Bupati di Yogyakarta dan diberi beberapa tanah untuk dikelola dan dikembangkan di pusat kota Yogyakarta yang hingga saat ini menjadi jantung perekonomian Yogyakarta. Tan Jin Sing (1760-1831), seorang kapiten Tionghoa yang diangkat sebagai bupati Yogyakarta oleh Sultan HB III atas jasanya dalam membantu mendapatkan takhta dari Sultan HB II. Sebelum diangkat sebagai bupati dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat, Tan Jin Sing masuk Islam bersama istrinya atas bimbingan Kyai Reksonegoro. Pemerintah Belanda juga mengangkat seorang kapiten Tionghoa bernama To In sebagai penanda komunitas tersebut.⁷⁸

Kedekatan orang Tionghoa dengan pemerintahan di Yogyakarta juga berdampak positif bagi orang-orang Tionghoa yang ada di Yogyakarta. Ini terlihat saat Jepang menduduki pemerintahan di Indonesia, tidak seperti Tionghoa di daerah-daerah lain yang harus menjalani kerja paksa untuk pembangunan, orang Tionghoa di Yogyakarta tidak diberlakukan hal demikian berkat kedudukan sultan Yogyakarta. Walaupun diberlakukan namun tidak seperti di daerah lain yang harus menjalani kerja paksa di perkebunan dan pembangunan jalan tol. Mereka

⁷⁸ Andreas Susanto, "Orang Cina di Yogyakarta: Antara Penerimaan dan Penolakan" dalam *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, I. Wibowo (ed.), (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 63.

tetap menjalankan perannya dalam bidang ekonomi yang turut membantu perkembangan kota Yogyakarta. Hal ini terjadi berkat adanya kontrak-kontrak politik yang disepakati oleh pemerintahan Jepang dengan kesultanan Yogyakarta.

Sejak zaman kolonial, praktik diskriminasi terhadap Tionghoa telah menjadi kebijakan yang populer dan sistematis. Ironisnya, kebijakan model kolonialisme ini masih di terapkan Pemerintah Orde Baru, bahkan dalam dimensi lebih beragam. Kebijakan asimilasi gaya Orde Baru merupakan upaya meniadakan segala aspek kehidupan masyarakat Tionghoa agar menjadi sama dengan lainnya. Padahal keberagaman merupakan keniscayaan sebagai anugerah Tuhan yang tak bisa ditolak, apalagi dihilangkan. Menurut Dr. Nasikun secara horizontal, masyarakat Indonesia memiliki kesatuan-kesatuan sosial atas dasar ikatan primordial, seperti suku, agama, adat, daerah, hingga hubungan darah. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia di tandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dengan lapisan bawah. Hal ini harus disikapi secara arif agar tidak menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Kemajemukan bukan untuk dihindari karena justru dapat dikembangkan sebagai potensi kemajuan bangsa.⁷⁹ Keberadaan masyarakat Tionghoa perlu di hadirkan dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Peran dan kontribusi orang-orang Tionghoa selama ini perlu di beri ruang dan pengakuan.

Hingga lengsernya pemerintah Soeharto yang kemudian digantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden terpilih pada 1999 mengeluarkan kebijakan untuk merevitalisasi adat istiadat dan kepercayaan

⁷⁹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*.

Tionghoa sekaligus mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 tentang pelarangannya terhadap berbagai ekspresi budaya orang Tionghoa. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan secara signifikan atas posisi orang Tionghoa di Indonesia. Perubahan iklim politik tersebut, langsung atau tidak, mendorong orang Tionghoa untuk lebih berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, baik perseorangan maupun berkelompok.

Angin segar bagi warga Tionghoa membuat euforia Imlek terasa di mana-mana. Tak hanya di tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan toko, berbagai media cetak maupun elektronik di Indonesia juga dipenuhi pesan Gong Xi Fa Cai. Iklan maupun informasi mengenai perayaan Tahun Baru Imlek dengan mudah dijumpai. Stasiun televisi juga menayangkan berbagai acara bertemakan khusus untuk menyambut Imlek. Kehadiran kue keranjang, lampion merah, angpao yang bergantung, hingga pertunjukan barongsai dan Liong bukan lagi hal yang aneh. Perayaan Tahun Baru Imlek 2566 pada 19 Februari 2015 ini menjadi bagian dari ekspresi kultural orang-orang Tionghoa di Indonesia. Perayaan Imlek tidak hanya ramai diselenggarakan di kelenteng, namun juga menjadi ritual tradisi di masjid, gereja, bahkan sebagai kirab masal. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Yogyakarta menyelenggarakan Imlek di Masjid Syuhada'.

Namun tidak seperti perayaan imlek pada umumnya, pada prosesi ini tidak pembakaran dupa dan juga ritual-ritual khas tionghoa lainnya seperti sesembahan terhadap leluhur dan sebagainya. Acara perayaan hanya diisi acara pengajian dan pembaiatan warga etnis Tionghoa yang ingin masuk Islam. Walau sempat tertunda, warga Tionghoa yang beragama muslim di Yogyakarta akhirnya

menggelar acara peringatan Tahun Baru Imlek di Masjid Syuhada, baru-baru ini. Acara, yang sempat menimbulkan protes sejumlah kalangan ini terselenggara setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia setempat. Pada mulanya mereka berencana menggelar peringatan Imlek 2554 di Masjid Syuhada, awal Februari silam. Namun, karena adanya protes berbagai kalangan, terutama kelompok umat Islam, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta menunda pelaksanaan acara itu. Apalagi, izin dari MUI yang sudah diupayakan dua pekan sebelumnya belum juga turun. Pasalnya, MUI keberatan masjid digunakan untuk merayakan hari besar agama di luar Islam. Namun, setelah diperlihatkan sejumlah data dan fakta bahwa perayaan Imlek tak terkait agama tertentu ataupun Khong Hu Cu, akhirnya MUI mengizinkan perayaan acara di Masjid Syuhada.